

## Pengaruh E-Government Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik di Pemerintahan Daerah (Studi Kecamatan WAWO NTB Bima)

Iswanda Sulastril<sup>1\*</sup>, Abdul Wahid Mahsuni<sup>2</sup>, Siti Aminah Anwar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

\*Email Korespondensi : [iswandasulastril@gmail.com](mailto:iswandasulastril@gmail.com)

### ABSTRACT

*The rapid development of Information and Communication Technology (ICT) has significantly influenced governance in Indonesia, particularly through the implementation of E-Government. This study examines the impact of E-Government on transparency and accountability in public financial management at the regional government level, focusing on Wawo District, Bima, West Nusa Tenggara. Using a quantitative approach, data was collected from 40 civil servants through questionnaires and analyzed using descriptive statistics and simple linear regression. The results indicate that E-Government enhances transparency by providing open access to financial data and increases accountability through accurate financial reporting. However, challenges such as limited internet infrastructure and technical expertise hinder its optimal implementation. These findings highlight the importance of strengthening E-Government to improve.*

**Keywords :** E-Government, transparency, accountability

### PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat seiring dengan era globalisasi memberikan dampak yang sangat besar, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Salah satu dampak positifnya adalah munculnya konsep *E-government* atau pemerintahan berbasis elektronik. *E-government* memanfaatkan teknologi digital untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan efisiensi, serta memperbaiki aksesibilitas layanan publik. Penerapan sistem *E-government* ini diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya di tingkat pemerintahan daerah, dengan memungkinkan pemerintah untuk lebih terbuka dalam mengelola data dan informasi keuangan serta meningkatkan pertanggung jawaban dalam penggunaan anggaran daerah.

Menurut "Survei *E-Government* PBB tahun 2022", lebih dari 60% negara anggota PBB telah meningkatkan penerapan *E-government* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih nyaman, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, *E-government* telah diadopsi melalui berbagai inisiatif, seperti Sistem *E-government* (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal transparansi dan pengelolaan keuangan daerah (United Nations, 2022). Pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan yang tertuang dalam UU No.1. Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Pemanfaatan *E-government* sendiri dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur pemerintah, derasnya arus informasi dan hadirnya media yang memenuhi seluruh aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menerbitkan sebuah pedoman *good public governance* Indonesia yang menjelaskan bahwa terdapat lima asas yang dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu transparansi, demokrasi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan. Dari kelima asas tersebut transparansi dan akuntabilitas mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*), penyediaan informasi memadai yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan (Wilopo, 2017). Keterbukaan informasi dan pengungkapan penting dilakukan oleh pemerintah untuk menarik kepercayaan dari pemangku kepentingan. Selain itu dengan pengungkapan dan keterbukaan informasi maka akan meminimalisir tindakan korupsi. Pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengeluarkan instruksi yang mewajibkan pemerintah daerah memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan melalui sistem *E-budgeting* dan *E-planning* (Kementerian Dalam Negeri, 2021).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi menuntut pemerintah untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait pengelolaan keuangan serta kebijakan publik. Sementara itu, akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik kepada masyarakat. Peningkatan transparansi melalui *E-Government* dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi dalam pengawasan anggaran daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Indonesia yang menemukan bahwa transparansi keuangan daerah melalui *E-government* mampu mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran publik (Cucciniello, Porumbescu, & GrimmeliKhuisen, 2017). Transparansi berperan penting sebagai jaminan kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dapat diperoleh dengan mudah, selalu tersedia, dan akurat dalam hal pengelolaan program serta kebijakan internal di instansi tersebut. Salah satu bentuk transparansi yang sangat penting dan bisa menimbulkan masalah jika tidak dipublikasikan adalah transparansi anggaran. Keterbukaan anggaran mencakup akses informasi terhadap sumber dan jumlah dana, rincian penggunaan, serta pertanggungjawabannya yang harus jelas, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengetahuinya. Dalam jurnal ISEAS berjudul *Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian District* (Stein dkk, 2009: 65) menyatakan bahwa, “transparansi seharusnya dapat meningkatkan sistem tata kelola, namun dokumen negara tetap bersifat rahasia, keinginan politik untuk menerapkan Undang-Undang Kebebasan Informasi masih kurang, dan pemerintah di berbagai tingkatan menunjukkan sedikit minat serta kemampuan dalam penganggaran berbasis kinerja.”

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*

*government* juga membuka peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.

Daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang sering kali masih memiliki keterbatasan akses jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam mengelola sistem *E-government* menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Tantangan ini juga dirasakan di Kecamatan Wawo, yang masih menghadapi kendala infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung penerapan *E-government* secara optimal. Alasan saya memilih penelitian di NTB, khususnya di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan *E-government* terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di pemerintahan daerah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana teknologi informasi mampu memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai dampak *E-government* dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di tingkat daerah, serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan implementasi *E-government* yang lebih optimal.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori *Agency*

Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan berkaitan dengan menyelesaikan dua masalah yang dapat terjadi di dalam hubungan keagenan. Yang pertama adalah masalah keagenan yang muncul ketika keinginan atau tujuan prinsipal dengan agen bertentangan dan sulit bagi prinsipal untuk memverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan agen. Permasalahan dalam hal ini adalah terbukti bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi bahwa agen telah berperilaku dengan tepat. Kedua, masalah pembagian risiko yang muncul ketika prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Hal ini mengidentifikasikan bahwa prinsipal dan agen mungkin lebih menyukai tindakan yang berbeda karena preferensi risiko yang berbeda. Teori agensi merupakan teori yang membahas hubungan antara prinsipal dan agen. Hubungan keagenan sebagai kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen), untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka. Hal ini melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen, 1976). Prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk melakukan sebuah tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan. Pemerintah daerah sebagai agen yang diberikan wewenang oleh masyarakat wajib memenuhi keinginan dan harapan masyarakat.

### Transparansi

Menurut Mahmudi (2016:17), transparansi memiliki arti keterb

Transparansi mampu menjembatani informasi antara pemerintah dan Masyarakat (publik) sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya apa yang diinginkan masyarakat dengan mudah dapat diketahui pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah menurut “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah” mendefinisikan Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Berliana Rahmiyati, 2022) indikator Transparansi adalah Informatif, Keterbukaan dan, Pengungkapan.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan pemaparan informasi aktivitas keuangan dan non keuangan pemerintah kepada masyarakat atas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai sebuah pertanggungjawaban, akan tetapi pemberi artian ini dapat memburamkan arti kata dari *Accountability*. Akuntabilitas publik merupakan sebuah kewajiban pemegang amanah (*Agent*) untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas. Kegiatan ini menjadi keharusan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban kepada para pemegang Amanah. Pelaksanaan Akuntabilitas publik pemerintah berkewajiban memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Adapun hak-hak publik tersebut yaitu hak untuk tahu (*Right to know*), hak untuk diberi informasi (*Right to be informed*), hak untuk didengar aspirasinya (*Right to be heard and to be listened to*) (Mardiasmo, 2018).

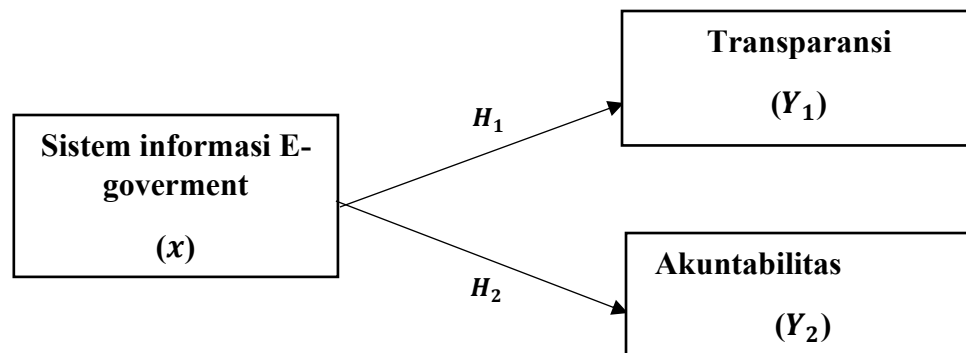
Kewajiban mempertanggungjawabkan, menyediakan, melaporkan, dan menyampaikan seluruh hal yang menjadi kewajibannya pada pihak utama yang memegang hak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban merupakan arti dari akuntabilitas (Shara,2020). Kesimpulannya adalah dalam akuntabilitas, mengelola, melaporkan, dan menyampaikan semua tugas yang terkait dengan amanah kepada pemberi amanah adalah tanggung jawab pemangku amanah. Menurut (Berliana Rahmiyati, 2022) akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas program, Akuntabilitas kebijakan publik.

### **Sistem Informasi E-government**

Menurut Abbas (2014:4) *E-Government* yaitu sebuah aplikasi TI yang berbasis digital menggunakan internet dengan menggunakan perangkat komputer maupun aplikasi lainnya yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun

pelayanan, Kepercayaan pada kualitas informasi, Kepercayaan terhadap sistem teknologi informasi *E-government*, Kepercayaan pada sistem transaksi, Kepercayaan terhadap instansi pemerintah penyedia layanan, Kepercayaan pada institusi pendukung layanan, Kepercayaan pada teknologi.

### Kerangka Konseptual



## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang telah dihasilkan sebelumnya. Pendekatan ini mengandalkan pengukuran numerik untuk penghitungan dan menggunakan statistik untuk membuat generalisasi dari populasi yang ada (Sampieri, et al., 2013:5). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data yang diproses dari jawaban responden yang memenuhi kriteria sampel di Kecamatan Wawo NTB BIMA.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:215), populasi adalah suatu wilayah yang generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai atribut dan karakteristik tertentu yang dipelajari oleh peneliti dan diambil kesimpulannya. Berdasarkan definisi populasi dan judul yang benar, maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pegawai yang bekerja di Instansi pemerintah yaitu di Kantor Camat Wawo BIMA. Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, metode yang digunakan adalah Sampel jenuh.

### Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:141), teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, sesuai dengan variabel yang berkaitan dengan judul. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah kuesioner. Teknik pengumpulan data yang melibatkan penyajian kepada responden serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis. Kemudian akan diuji validitas dan reliabilitas Sugiyono, (2019:142). Dalam alat

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1 Hasil Penelitian Analisis Statistik Deskriptif**

| Variabel                      | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-------------------------------|---------|---------|------|----------------|
| Sistem informasi e-government | 2       | 5       | 3,85 | 0,864          |
| Transparansi                  | 3       | 5       | 4,38 | 0,586          |
| Akuntabilitas                 | 3       | 5       | 4,47 | 0,599          |
| N                             | 40      |         |      |                |

Sumber: Data yang diolah, 2025

Diketahui bahwa rata-rata tanggapan responden variabel Sistem Informasi E-government sebesar 3,85 dengan nilai minimum sebesar 2 dan *maximum* sebesar 5. Rata-rata tanggapan responden variabel Transparansi sebesar 4,27 dengan nilai minimum sebesar 3 dan *maximum* sebesar 5. Rata-rata tanggapan responden variabel Akuntabilitas sebesar 4,47 dengan nilai minimum sebesar 3 dan *maximum* sebesar 5. Nilai standar deviasi pada variabel Sistem Informasi E-government sebesar 0,864; variabel Transparansi sebesar 0,586; variabel Akuntabilitas 0,599. Nilai standar deviasi dalam penelitian ini menjelaskan tentang tanggapan responden pada setiap variabel yang bervariasi.

### Uji Kualitas Data

#### A. Hasil Penelitian Uji Validitas Data

**Tabel 2 Hasil Penelitian Uji Validitas Data**

| Item | Corrected Item-Total Correlation | r Tabel (5%) | Keterangan |
|------|----------------------------------|--------------|------------|
| X.1  | 0,75                             | 0,31         | Valid      |
| X.2  | 0,71                             |              | Valid      |
| X.3  | 0,69                             |              | Valid      |
| X.4  | 0,69                             |              | Valid      |
| X.5  | 0,64                             |              | Valid      |
| X.6  | 0,62                             |              |            |

| Item  | Corrected Item-Total Correlation | r Tabel (5%) | Keterangan |
|-------|----------------------------------|--------------|------------|
| Y2.9  | 0,74                             |              | Valid      |
| Y2.10 | 0,72                             |              | Valid      |

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian validitas, setiap item pada variabel yang diuji menunjukkan nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari r tabel (0,31), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item yang digunakan adalah valid. Pada variabel Sistem informasi e-government nilai validitas berkisar antara 0,48–0,75, sedangkan pada variabel Transparansi berkisar antara 0,61–0,94. Untuk variabel Akuntabilitas, nilai yang diperoleh berada dalam rentang 0,66–0,87. Dengan demikian, semua item dalam penelitian ini dapat dianggap valid dan layak digunakan untuk pengukuran masing-masing variabel.

## B. Uji Reliabilitas

**Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian**

| Variabel                          | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|-----------------------------------|------------------|------------|
| Sistem informasi e-government (X) | 0,920            | Reliabel   |
| Transparansi (Y1)                 | 0,916            | Reliabel   |
| Akuntabilitas (Y2)                | 0,837            | Reliabel   |

Sumber: Data yang diolah, 2025

Pengujian reliabilitas pada variabel penelitian yaitu Sistem Informasi E-government ( $x$ ), Transparansi ( $y_1$ ), dan Akuntabilitas ( $y_2$ ), didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* pada setiap variabel penelitian  $> 0,60$ , sehingga disimpulkan bahwa keseluruhan variabel penelitian adalah reliabel.

## Uji Normalitas

**Tabel 4 Hasil Penelitian Uji Normalitas**

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test |  |  |
|------------------------------------|--|--|
|                                    |  |  |

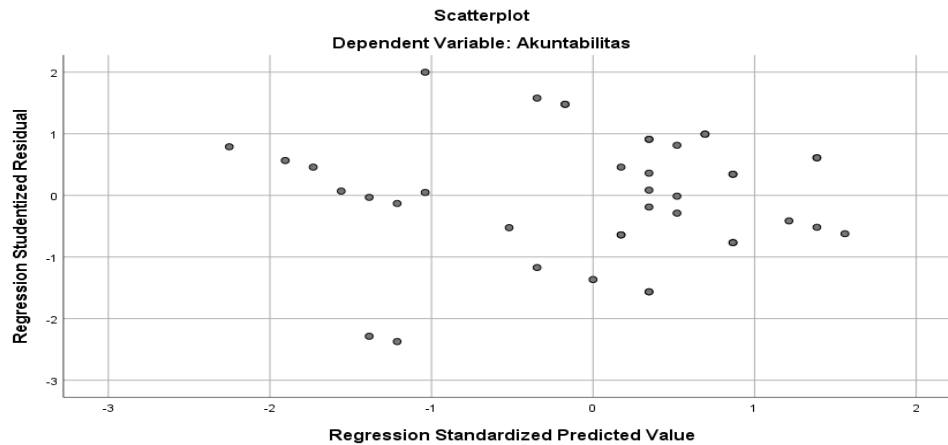
## Uji Asumsi Klasik

### A. Uji Multikolinieritas

| Coefficients <sup>a</sup> |                               |                             |            |                           |       |      |                         |       |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model                     |                               | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|                           |                               | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| 1                         | (Constant)                    | 16.373                      | 5.464      |                           | 2.996 | .005 |                         |       |
|                           | Sistem informasi e-government | .372                        | .109       | .485                      | 3.422 | .002 | 1.000                   | 1.000 |

Hasil pengujian terhadap ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas pada model yang digunakan dalam penelitian didapatkan nilai *tolerance* variabel Sistem Informasi *E-government* (x) sebesar  $1 > 0,1$  dan nilai VIF sebesar 1. Hasil tersebut mengidentifikasi bahwa tidak terjadi korelasi dan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam regresi yang digunakan dalam menilai variabel Transparansi ( $y_1$ ).

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |   |      |                         |     |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---|------|-------------------------|-----|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics |     |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |   |      | Tolerance               | VIF |
| 1                         | (Constant) | 27.090                      |            |                           |   |      |                         |     |



Gambar 1.2 Variabel Akuntabilitas

Sumber: Data diolah, 2025

## Uji Hipotesis

### A. Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

| Model Summary <sup>b</sup>                               |                    |          |                   |                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                                                    | R                  | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                                                        | 0,485 <sup>a</sup> | 0,236    | 0,215             | 3.91504                    |
| a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi E-government |                    |          |                   |                            |
| b. Dependent Variable: Transparansi                      |                    |          |                   |                            |

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil ini menunjukkan nilai *Adjusted R Square* (koefisien determinasi) sebesar 0,215 (21,5%). Persentase *Adjusted R square* mengindikasikan bahwa Sistem Informasi *E-government* dipengaruhi oleh Transparansi sebesar 21,5%, sedangkan sisanya sebesar 78,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diteliti seperti partisipasi publik, budaya organisasi, kompetensi SDM dan lain-lain.

| Model Summary <sup>b</sup> |                    |          |                   |                            |
|----------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                  | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | 0,493 <sup>a</sup> | 0,224    | 0,224             | 3.68728                    |
| a.                         |                    |          |                   |                            |

| Coefficients <sup>a</sup>         |                               |                             |            |                           |       |      |                         |       |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model                             |                               | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|                                   |                               | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| 1                                 | (Constant)                    | 27.090                      | 5.146      |                           | 5.264 | .000 |                         |       |
|                                   | Sistem informasi e-government | .358                        | .102       | .493                      | 3.498 | .001 | 1.000                   | 1.000 |
| Dependent Variable: Akuntabilitas |                               |                             |            |                           |       |      |                         |       |

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji Parsial (t) menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi *E-government* (*p-value*) < 0,05 dengan nilai signifikan 0,000, maka  $H_0$  ditolak yang menandakan bahwa variabel Sistem Informasi *E-government* berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas.

## Pembahasan

### Pengaruh Sistem Informasi *E-government* terhadap Transparansi

Berdasarkan variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai Sistem Informasi *E-government*  $\beta$  (0,372) dengan nilai t-hitung sebesar (3,422) dan Tingkat signifikan sebesar (0,002) < 0,05). berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan nilai Sistem Informasi *E-government*  $\beta$  (0,358) dengan t-hitung sebesar (3,498) dan Tingkat signifikan sebesar (0,001) < 0,05) sehingga hasil tersebut dapat disimpulkan berpengaruh positif signifikan variabel. Berarti bahwa semakin baik penerapan Sistem Informasi *E-government*, maka Transpar

yang lebih besar.

2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain yang mungkin memengaruhi hubungan antara *E-Government*, Transparansi, dan Akuntabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2014). Tata Kelola Website pada Instansi Pemerintah. Bengkulu.
- Berliana Rahmiyati. (2022). Indikator Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik. *Jurnal Akuntansi Publik*, 15(2), 45-60.
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmeliikhuijsen, S. G. (2017). 25 Years of Transparency Research: Evidence and Future Directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685>
- Eisenhardt, & M., K. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57-74.
- Effendi, H. (2019). Peran e-government dalam pelayanan publik: Studi kasus di pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 56-67.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hoa, X. Q., & Zamor, G. (2017). Transparency in Government: Bridging the Gap between Policy and Implementation. *Public Sector Journal*, 12(4), 98-113
- JENSEN, M. C., & Mecking, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 3(4), 305-360.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penguatan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kemendagri.
- Kumar, R., Best, M. L., & Heryana, D. (2013). E-Government Adoption in Developing Countries: Challenges and Opportunities. *Journal of E-Governance Studies*, 8(2), 123-136.
- Mardiasmo. (2018). "Akuntansi Sektor Publik." Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2, No. 1, Mei 2006.
- Mardiasmo. (2018).

- United Nations. (2022). UN E-Government Survey: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. New York: UNDESA
- Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas &Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 61. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).61-78](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).61-78).
- Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas &Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 61. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).61-78](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).61-78).